

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MAKASSAR

Anwar Ramli, Muh. Jamil, Yusri Karmila

Universitas Negeri Makassar

Abstract. This research is attempt to identify, trace, and analyze factors - factors affect poverty level in Makassar City, namely how much influence government spending on infrastructure, investment, per capita income and proxied education (average length of school) and poverty alleviation program strategies in Makassar city. Development in the city of Makassar is said to be successful if the number and percentage of poor people decreases or does not exist, but the poverty rate in the city of Makassar has not yet reached the maximum and is in accordance with the target. This indicates that it is necessary to observe and review the poverty reduction program strategies carried out by the regional government and the factors that can affect poverty in Makassar city in dealing with poverty by increasing understanding of its root causes, given the importance of sustainable poverty reduction in Makassar City. it is comprehensive in nature, so that in solving the poverty problem, it is necessary to develop existing strategies or those that have been carried out by government so that it can provide better results. The simultaneous test results in the regression analysis can be concluded the variables of Government Expenditures for Infrastructure, Investment, Per Capita Income and Average Length of Schools, if tested together, have a significant effect on the level of poverty. Meanwhile, the partial test, namely government spending on infrastructure, investment, per capita income and average length of schooling, does not have a significant effect on poverty levels in the city. Every year the poverty reduction program has increased, but the number of poor people in Makassar City has fluctuated every year. Meanwhile, from the number of poor people, the government issues a poverty budget. Where the population increases, the total regional expenditure for poverty alleviation decreases, conversely if the population decreases, the total regional expenditure for poverty alleviation increases.

Keywords: Infrastructure, Investment, Per capita Income and Average Years of Schooling, Poverty Level.

PENDAHULUAN

Peningkatan akan pertumbuhan ekonomi menjadikan paradigma otonomi yang memberikan kewenangan, hak, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri dalam mengembangkan berbagai potensi yang memerlukan peningkatan kemampuan dan kebijakan kepala daerah dalam berbagai aspek manajerialnya agar dapat mencapai tujuan sesuai visi misi otonomi. Sehingga dengan terwujudnya desentralisasi diharapkan daerah mampu mempercepat pembangunan, berkurangnya kesenjangan antar daerah, dan khususnya penurunan angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang membutuhkan penanggulangan dan pendekatan sistematis, terpadu dan komprehensif untuk memenuhi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara melalui pengembangan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat

(Fikri, Nurpratiwi, & Saleh, 2015). Kemiskinan terkait erat dengan ketiadaan aset dan akses yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Seperti keterbatasan memperoleh kebebasan dan hidup sesuai tingkat harapan hidup, ketidakmampuan untuk mendapatkan pendidikan, akses fasilitas air bersih, fasilitas jamban, dan kesehatan yang memadai, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar dari pangan, sandang, dan papan.

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Tentunya ingin mempercepat pembangunan dengan mencanangkan menuju kota dunia dan untuk pencapaiannya bukanlah hal yang mudah. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kesiapan pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam negeri tentunya tidak cukup, sehingga peran investor asing sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan yang ada di Kota Makassar.

Pembangunan di kota Makassar dikatakan berhasil apabila jumlah dan persentase penduduk miskinnya turun atau tidak ada, namun tingkat kemiskinan di kota makassar belum mencapai maksimal dan sesuai dengan target. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu dicermati dan dikaji ulang atas strategi program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di kota Makassar dalam menangani kemiskinan dengan ditingkatkan pemahaman akar penyebabnya, mengingat pentingnya keberlanjutan

Penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar di perlukan kajian yang sifatnya komprehensif, sehingga didalam memecahkan masalah kemiskinan tersebut diperlukan pengembangan strategi yang sudah ada atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik. Pengembangan strategi pengentasan kemiskinan, tidak hanya memfokuskan perhatian terhadap bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana memberdayakan potensi ekonomi, social dan budaya yang ada pada masyarakat dan sekaligus mendorong kearah bagaimana memotivasi masyarakat untuk hidup dan berusaha secara produktif. Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat miskin, maka perlu dan upaya strategi program pengentasan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan agar dalam program pengentasan kemiskinan dapat memberikan hasil yang lebih baik sebagai upaya evaluasi sekaligus. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan penelitan "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kota Makassar".

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks faktor yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian, selain itu juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-

sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Kemiskinan juga merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan di kota Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini mengkaji, menganalisis dan mengimplementasikan model pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan di Makassar, peneliti ingin mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Makassar yaitu seberapa besar pengaruh belanja pemerintah untuk infrastruktur, investasi, pendapatan perkapita dan pendidikan yang diprosi (rata - rata lama sekolah) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar?
2. Bagaimana implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan di kota Makassar?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah fenomena yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata. Padahal, kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Andre Bayo Ala (1981) dalam Waruwu (2016), kemiskinan bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun banyak memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

2. Indikator Kemiskinan

Seseorang atau sekelompok orang miskin mempunyai daya aksesibilitas yang rendah dan terbatas terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dibandingkan mereka yang termasuk golongan menengah ataupun golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin yaitu : 1. Akses untuk mendapatkan makanan yang layak, 2. Akses untuk mendapatkan sandang yang layak, 3. Akses untuk mendapatkan rumah yang layak, 4. Akses untuk layanan kesehatan, 5. Akses untuk mendapatkan pendidikan, 6. Akses kepada *leisure* dan *entertainment*, 7. Akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak.

Penelitian ini penulis menggunakan indikator kemiskinan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang

diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan

Belanja pemerintah salah satu komponen variabel yang dapat mengubah pendapatan nasional. Richardson (Jhingan, 2013) berpendapat bahwa suatu hal yang sangat berguna dari model ini adalah kenaikan pendapatan dapat meningkat jika belanja pemerintah dipusatkan pada daerah - daerah yang masih terbelakang. Sebagaimana teori Lewis dalam fatin lestari(2008), kondisi pareto optimal akan tercapai bila terjadi mobilitas faktor - faktor produksi (*labour*) tanpa hambatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Daerah - daerah yang memiliki tingkat mobilitas faktor - faktor produksi antar daerah rendah akan menyebabkan pertumbuhannya rendah. Daerah - daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi menunjukkan bahwa faktor - faktor produksi di daerah yang bersangkutan memiliki mobilitas antar daerah yang rendah. Infrastruktur dapat digolongkan sebagai modal atau capital. Infrastruktur tergolong sebagai *social overhead capital*, berbeda dengan modal yang berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan produksi, perluasan infrastruktur tidak hanya menambah stok dari modal tetapi juga sekaligus meningkatkan produktifitas perekonomian dan taraf hidup masyarakat luas.

a. Investasi terhadap Kemiskinan

Hakikat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial ekonomi. Hal ini hanya mungkin jika laju pembentukan modal didalam negeri cukup cepat, yaitu jika bagian dari pendapatan atau output masyarakat yang ada hanya sedikit saja yang digunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan. Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan produksi tapi juga meningkatkan kesempatan kerja. Pembentukan modal juga mampu menciptakan perluasan pasar, membantu menyingkirkan ketidakpastian pasar dengan menciptakan modal overhead sosial dan ekonomi. Jadi investasi dapat memotong rantai kemiskinan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran.

b. Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil - hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan

ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Karya Mandeville yang termasyur (*Fable of the bees*) mengatakan bahwa keburukan konsumsi pribadi dianggap untuk kebaikan umum. Kemewahan yang mengantarkan kemauan ekonomi dan merangsang keinginan orang memberikan lapangan kerja bagi orang miskin.

c. Pendidikan terhadap Kemiskinan.

Konsep pertumbuhan tidak berimbang, investasi harus dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang terpilih saja agar cepat berkembang dan hasil ekonominya dapat digunakan untuk pembangunan sektor. Konsep ini dapat diterapkan pada Negara/daerah yang masih terbelakang, dengan menciptakan overhead social lebih dulu. Pendekatan MOS (*Modal Overhead Sosial*) dalam pembangunan ekonomi ialah membuat ketidakseimbangan ekonomi sedemikian rupa sehingga merangsang investasi berikutnya di bidang KLP (Kegiatan Langsung Produktif). Seperti dikatakan Hirschman "investasi di bidang MOS dianjurkan bukan karena akibat langsung pada output akhir, tapi karena ia memungkinkan dan nyata mengundang masuknya investasi di bidang KLP.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, di mana program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial terdiri dari 3 program, yaitu : 1. Program bantuan sosial 2. Program pemberdayaan masyarakat 3. Program usaha ekonomi kecil dan mikro Selain itu, ditambah dengan tiga program baru dengan cakupan yang lebih luas kepada rumah tangga sangat miskin yang meliputi : Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) (Rustanto, 2015). Berdasarkan data perlindungan sosial global, memperkirakan bahwa program perlindungan sosial yang saat ini mencegah 150 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan. Bahkan jika semua negara-negara berpenghasilan rendah bisa mencapai efisiensi penargetan yang terbaik yang diamati dunia, hanya 50% yang dapat mengurangi separuh kesenjangan kemiskinan melalui perlindungan sosial (Fizzbein, Kanbur, & Yemstsov, 2014).

Program pengentasan kemiskinan yang ditargetkan dan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, kemiskinan tetap pada tingkat agregat. Seringkali tindakan korektif yang diadopsi oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dapat menghasilkan masalah lebih lanjut, seperti sebagai penerima manfaat dari program mentransfer sumber daya diterima dari non-

miskin yang mungkin tidak menjadi kelompok sasaran, yang pada gilirannya dapat membuat orang miskin masih miskin (Chakravarty & D'Ambrosio, 2013).

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan implementasi strategi program pengentasan kemiskinan di kota makassar. Pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan dan implementasi strategi program penanggulangan kemiskinan di kota Makassar.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Survei Instiusional Survei ini dilakukan dengan mengunjungi instansi terkait untuk memperoleh data yang diperlukan.
- b. Studi literatur Studi litetatur yang dilakukan pada penelitian ini merupakan kompilasi data pencatatan administrasi atau dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian penelitian. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan studi dokumentasi.

3. Teknik Analisa Data

Tenik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Analisis Regresi. Rancangan analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi berganda karna lebih dari satu variabel bebas. Dalam hal ini, variabel Belanja Pemerintah untuk Infrastruktur (X1), Investasi (X2), Pendapatan Perkapita (X3) dan Rata Rata Lama Sekolah (X4) digunakan untuk menjelaskan variabel terikat yaitu tingkat Kemiskinan (Y).

4. Pengujian Model

Uji Statistik t, Uji Statistik F, Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Asumsi Klasik, Uji Multikolinieritas, Autokorelasi

5. Menganalisis Strategi Program Penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar

Mengevaluasi strategi program penanggulangan kemiskinan secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan melihat anggaran dan tingkat kemiskinan yang dapat menggambarkan strategi penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Tentunya ingin mempercepat pembangunan dengan mencanangkan menuju kota dunia dan untuk pencapaiannya bukanlah hal yang mudah. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan kesiapan pembangunan infrastruktur dalam skala besar.

Pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam negeri tentunya tidak cukup, sehingga peran investor asing sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan yang ada di Kota Makassar. Dengan kata lain, investasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Investasi di berbagai sektor pada umumnya dapat menumbuhkan *multiplier effect* dalam lingkaran ekosistem ekonomi. Dalam konteks daerah, sasaran investasi sejatinya ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Maka peneliti memilih melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Makassar. Dimana Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan yaitu Belanja Infrastruktur, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan tahun 2014-2019 di Kota Makassar.

Tabel 1. Belanja Infrastruktur, Investasi, Pendapatan Perkapita, Rata Rata Lama Sekolah dan tingkat kemiskinan tahun 2014-2019 di Kota Makassar

Tahun	Y(Tingkat Kemiskinan)	X1 (Infrastruktur)	X2 (Investasi)	X3(Pendapatan Perkapita)	X4(Rata-rata lama sekolah)
2014	11.07	26.98	28.16	17.87	2.36
2015	11.05	27.27	27.88	18.05	2.38
2016	11.11	27.38	28.29	17.87	2.40
2017	11.13	27.29	27.86	17.89	2.41
2018	11.10	27.49	28.42	18.03	2.41
2019	11.08	27.75	28.29	18.20	2.42

Sumber: Data BPS 2020

Hasil data yang diterima menggambarkan bahwa Belanja Infrastruktur, Investasi, Pendapatan Perkapita, Rata Rata Lama Sekolah dan tingkat kemiskinan di Kota Makassar Tahun 2014-2019 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program-program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara

rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Untuk menganalisis program penanggulangan kemiskinan di kota makassar, Berikut ini merupakan jumlah anggaran dan tingkat kemiskinan di kota makassar.

Tabel 2. Anggaran dan Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar

Tahun	Anggaran Kemiskinan (miliar)	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
2014	164	64.24
2015	379	63.78
2016	298	66.78
2017	325	68.19
2018	416	66.22
2019	469	65.12

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan

Pengeluaran atau belanja daerah yang sehubungan dengan kebijakan pemerintah daerah yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pengentasan kemiskinan, pada tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa anggaran kemiskinan tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin di Kota Makassar mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan dari jumlah penduduk miskin pemerintah mengeluarkan anggaran kemiskinan. Dimana jumlah penduduk naik maka jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan turun sebaliknya jika jumlah penduduk berkurang maka jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan naik.

Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Pemerintah untuk Infrastruktur (X1), Investasi (X2), Pendapatan Perkapita (X3) dan Rata Rata Lama Sekolah (X4) jika diuji secara bersama-sama maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (Y). Sedangkan Uji Parsial Untuk menguji dan mengetahui seberapa besar signifikansi pengaruh Belanja Pemerintah untuk Infrastruktur, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Kota, dapat melihat dimana nilai t hitung variabel Belanja Infrastruktur (X1) lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikan di atas 0,05 yaitu 0,404, t hitung variabel minat dalam Investasi (X2) lebih besar daripada nilai t tabel dengan tingkat signifikan di atas 0,05 yaitu 0,519, Pendapatan Perkapita (X3) lebih kecil dari nilai t tabel dengan tingkat signifikan di atas 0,05 yaitu 0,312 dan t

hitung variabel Rata Rata Lama Sekolah (X4) lebih besar daripada nilai t tabel dengan tingkat signifikan di atas 0,05 yaitu 0,161. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji parsial (uji-t) dalam analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut Variabel X1, X2, X3,X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y.

Pemerintah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan, salah satunya adalah program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin sedangkan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin di Kota Makassar mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan dari jumlah penduduk miskin pemerintah mengeluarkan anggaran kemiskinan. Dimana jumlah penduduk naik maka jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan turun sebaliknya jika jumlah penduduk berkurang maka jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan naik.

Penelitian Hastuti & Rahutami (2009) bahwa ketidaksikronan data dalam pengukuran kemiskinan perlu upaya untuk mensinergikan data kemiskinan, serta perlu pelibatan pihak swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi kemiskinan di Kota Makassar. Indikator kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi. Adapun indikator-indikator kemiskinan menurut BPS yaitu: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar; tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya; tidak adanya jaminan masa depan; kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massa; rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam; kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat; tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan ketidakmampuan sosial (anak-anak terlantar, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

KESIMPULAN

Hasil uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa variable Belanja Pemerintah untuk Infrastruktur (X1), Investasi (X2), Pendapatan Perkapita (X3) dan Rata Rata Lama Sekolah (X4) jika diuji secara bersama-sama maka berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemiskinan (Y). Sedangkan Uji Parsial Untuk menguji dan mengetahui seberapa besar signifikansi pengaruh Belanja Pemerintah untuk Infrastruktur, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Rata Rata Lama Sekolah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota.

Program penanggulangan kemiskinan tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin di Kota Makassar mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sedangkan dari jumlah penduduk miskin pemerintah mengeluarkan

anggaran kemiskinan. Dimana jumlah penduduk naik maka jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan turun sebaliknya jika jumlah penduduk berkurang maka jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan naik.

Diharapkan adanya tambahan alokasi belanja langsung di dalam penganggaran agar dapat memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan dengan cara mengambil atau merelokasi anggaran-anggaran lain yang kurang mengena, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan ekonomi. Dan diharapkan Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar dievaluasi kembali terutama program-program yang kurang terealisasi agar anggaran lebih dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat miskin.

DAFTAR PUSAKA

- Abu, U. A., & Kabir, H. (2003). The time value of money concept in islamic finance. *The American Jurnal of Islamic Social Sciences*, 23 (1).
- Aritonang Triana Mauliasih. 2012. *Kemiskinan, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1981-2011*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. 2014. Proinsi Sulawesi Selatan.
- Bappenas. 2003. *Infrastruktur Indonesia Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Jhingan, M.L, 2013. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Jonaidi,Arius 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia*
- Lestari,Fatin.Catur 2008. *Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur: Studi Kasus Indonesia, 1976-2006*.Skripsi. Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor,Bogor.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mudrajad,Kuncoro,2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* : Penerbit Erlangga Dicitak oleh : PT Gelora Aksara Pratama
- Oktima, Nurul. 2012. *Kamus Ekonomi*. PT. Aksara Sinergi Mendia: Surakarta
- Rahim, Abd. 2012. *Model Ekonometrika Perikanan Tangkap*. Badan Penerbit UNM. Makassar.
- Ramelan, R. 1997. *Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia*. Koperasi Jasa Profesi LPPN, Jakarta.
- Rozi, M. 2007. *Dampak Otonomi Daerah terhadap Pengurangan Kemiskinan, Kasus Provinsi Riau*.Tesis: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Siti Walida Mustamin dkk.2015.*Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Kota MakassarProvinsi Sulawesi Selatan.FE Universitas Hasanuddin*.